



# Tata Kelola Anggaran dan Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Marselinus Nirwan Luru<sup>1\*</sup>, Choirel Woestho<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Ilmu Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, IPB University, Bogor, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Diajukan: 10 Maret 2025

Direvisi: 10 April 2025

Diterima: 23 April 2025

Tersedia online: 30 April 2025

### Kata Kunci:

Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, Nusa Tenggara Barat

### Keywords:

Budget Governance, Government Governance, Poverty Rate, West Nusa Tenggara

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA.

The study employs a range of ratios, including effectiveness, efficiency, operating expenditure, capital expenditure, and government governance, as measured by the LPPD score, to analyze the impact of budget management on regional poverty rates. The findings of the study suggest that the capital expenditure ratio and the LPPD score have a significant impact on the regional poverty rate in West Nusa Tenggara Province.

## ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerintah provinsi telah mengembangkan strategi yang berfokus pada pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak tata kelola anggaran terhadap tingkat kemiskinan wilayah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata kelola anggaran mengukur beberapa rasio yakni efektifitas, efisiensi, belanja operasional dan belanja modal serta tata kelola pemerintah melalui skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) menggunakan data panel antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya rasio belanja modal dan skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## ABSTRACT

West Nusa Tenggara Province is confronted with the challenge of elevated poverty rates, prompting the provincial government to devise a strategy that prioritizes budget management and effective governance as a means to alleviate poverty. The objective of this study is to ascertain the impact of budget management on poverty rates in West Nusa Tenggara Province. The study adopts a quantitative approach using panel data from 2012 to 2021.

## 1.1 PENDAHULUAN

Tata kelola memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah dan kota melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada berbagai skala [1]. Tata kelola pemerintah yang baik sebagai instrumen penting pembangunan wilayah dan kota menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan anggaran [1], [2]. Tata kelola yang baik tersebut tercermin dalam kemampuan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk mencapai kesejahteraan bersama [2], [3], [4].

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, sejumlah 13,83 persen atau peringkat 8 (delapan) dari seluruh provinsi di Indonesia [5]. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah NTB telah mengembangkan strategi berbasis tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Salah satunya melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat [6] tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [marselinus.nirwan@trisakti.ac.id](mailto:marselinus.nirwan@trisakti.ac.id)

integrasi dan efektivitas dalam manajemen pemerintahan. Regulasi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam kebijakan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah NTB juga menginisiasi berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah, sehingga alokasi anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan terhadap aplikasi perencanaan dan penganggaran (APP) untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan strategis dan berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan [7], [8].

Tata kelola anggaran memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya menjamin efisiensi dalam penggunaan dana publik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Seperti halnya penelitian [9] yang menegaskan bahwa pengelolaan arus keuangan yang efektif dapat menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Pendapatan serta pengeluaran daerah berdampak positif untuk peningkatan perekonomian daerah apabila tata kelola anggaran yang baik menjadi instrumen utama dalam menanggulangi kemiskinan melalui kebijakan yang berbasis data dan hasil [10].

Studi empiris lain [11] menyoroti bahwa rasio efektivitas, efisiensi, belanja operasional, dan belanja modal merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Rasio efektivitas mengukur pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan rasio efisiensi menilai sejauh mana biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tata kelola keuangan yang baik di tingkat daerah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi sumber daya yang lebih adil dan transparan.

Penelitian terdahulu juga telah banyak membuktikan adanya hubungan erat antara tata kelola yang baik dengan pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian [12] pada 57 negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa kualitas tata kelola memiliki dampak nonlinier terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, tata kelola yang lebih baik dapat mengurangi kemiskinan ekstrim secara signifikan. Pada aspek pengeluaran pemerintah, tata kelola yang baik yang efisien dapat mendorong kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan sebagaimana terjadi di Uni Eropa [10].

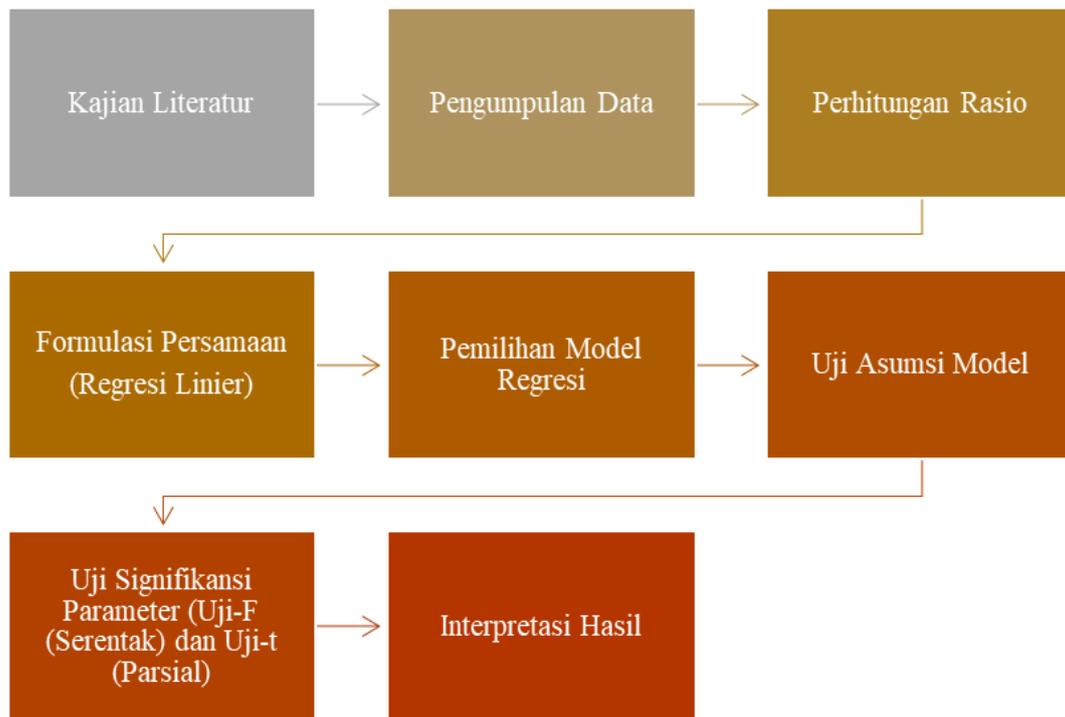
Kondisi serupa juga di Amerika Serikat dan Nigeria, bahwa tata kelola yang baik melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran berkontribusi dalam menekan disparitas kemiskinan [13]. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian [14] yang menunjukkan realisasi belanja pemerintah dan kesenjangan pendapatan memiliki efek positif terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Pada kasus lebih khusus, semisal krisis saat Covid-19, tata kelola yang responsif dan akuntabel menjadi faktor utama dalam mengurangi dampak wabah terhadap jumlah penduduk miskin [15].

Dari berbagai kajian, konsep dan implementasi kebijakan, penelitian ini bertujuan melakukan analisis pengaruh tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintah terhadap kemiskinan. Sebab, tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintah merupakan faktor kunci dan instrument penting dalam mengurangi kemiskinan wilayah. Hasil penelitian ini dapat diadopsi untuk pengelolaan anggaran serta kebijakan publik untuk mendorong realisasi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Tahapan dan Jenis Penelitian**

Tahapan penelitian ini bermula dari kajian literatur pendukung untuk menentukan variabel penelitian. Kemudian melakukan pengumpulan data untuk analisis perhitngan rasio, formulasi persamaan, pemilihan model, uji asumsi, dan interpretasi hasil, sebagaimana Gambar 1. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif berbasis data panel pada jangka waktu 2012-2021 yang bermanfaat untuk menganalisis hubungan antara tata kelola anggaran daerah dan tingkat kemiskinan wilayah.



Sumber: Hasil Olahan, 2025

Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian berjenis data sekunder. Data kemiskinan dan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari laporan resmi Badan Pusat Statistik, serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

### 2.3 Variabel

Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Rasio Efektivitas [11], [2], [3]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>• Rencana Anggaran PAD</li> </ul>
Rasio Efisiensi [11], [9], [2]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Belanja Daerah</li> <li>• Realisasi Pendapatan Daerah</li> </ul>
Rasio Belanja Operasional [4], [10], [3]	Proporsi Belanja Operasional terhadap Total Belanja Daerah
[Rasio Belanja Modal [4], [3], [16]	Proporsi Anggaran untuk Investasi Aset Tetap
Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) [2], [4], [16]	Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Daerah
Tingkat Kemiskinan [7], [8], [12]	Persentase Penduduk Miskin per Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Hasil Kompilasi, 2025

### 2.4 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya melakukan analisis dengan metode regresi data panel [17]. Metode ini bermanfaat dalam menilai variasi antar wilayah serta perubahan dari waktu ke waktu dengan persamaan, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 X5_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y<sub>it</sub> : tingkat kemiskinan wilayah ke-i pada tahun t
- X1 – X5 : variabel independen (rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja operasional, rasio belanja modal, dan skor LPPD)
- α : Konstanta (nilai dasar kemiskinan saat semua variabel X = 0)
- β1 – β5 : koefisien regresi (besar pengaruh masing-masing X terhadap Y)
- ε<sub>it</sub> : komponen kesalahan (*error*)

Pengukuran rasio-rasio berguna untuk mengetahui tata kelola anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{total belanja operasional}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Setelah mengetahui nilai masing-masing rasio, maka selanjutnya melakukan formulasi persamaan regresi agar mengetahui dampak setiap rasio terhadap kemiskinan. Adapun persamaan regresi linier, sebagai berikut:

$$K_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Refek}_{it} + \beta_2 \text{Refis}_{it} + \beta_3 \text{BOP}_{it} + \beta_4 \text{BM}_{it} + \beta_5 \text{LPPD}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

- K<sub>it</sub> : Tingkat kemiskinan wilayah ke-i pada tahun t
- Refek<sub>it</sub> : Rasio Efektivitas
- Refis<sub>it</sub> : Rasio Efisiensi
- BOP<sub>it</sub> : Rasio Belanja Operasional
- BM<sub>it</sub> : Rasio Belanja Modal
- LPPD<sub>it</sub> : Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- α : Konstanta (nilai dasar atau titik awal yang menunjukkan nilai K atau tingkat kemiskinan)
- β<sub>1</sub> – β<sub>5</sub> : Koefisien regresi
- ε<sub>it</sub> : Komponen kesalahan (*error term*)

Dalam hal estimasi regresi data panel melalui model *common effect*, *fixed effect*, dan *model random effect* [18] akan berguna untuk menganalisis hubungan variabel independen dan variabel dependen yang paling relevan dengan karakteristik data. Sebelum melakukan regresi, langkah pertama adalah menguji spesifikasi model untuk memilih model yang tepat

melalui beragam uji yakni *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier* [19]. Adapun penggunaan dan persamaan masing-masing uji tersebut adalah [18], [19]:

- *Uji chow* Menentukan apakah model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan *Common Effect* dengan persamaan:

$$F = \frac{(R_{FE}^2 - R_{CE}^2)/(N - 1)}{(1 - R_{FE}^2)(N \cdot T - N - K)}$$

- $R_{FE}^2$  : Koefisien determinasi model *fixed effect*
- $R_{CE}^2$  : Koefisien determinasi model *common effect*
- N : Jumlah unit *cross-section*
- T : Jumlah observasi *time-series*
- K : Jumlah parameter (variabel independen)

- *Uji Hausman* bertujuan menentukan ketepatan estimasi *fixed effect* lebih daripada random effect melalui persamaan:

$$(H = (\beta_{RE} - \beta_{FE})' \times [Var(\beta_{RE}) - Var(\beta_{FE})]^{-1} \times (\beta_{RE} - \beta_{FE}))$$

Keterangan:

- $\beta_{RE}$  : Vektor estimasi koefisien regresi dari model *Random Effect*
- $\beta_{FE}$  : Vektor estimasi koefisien regresi dari model *Fixed Effect*
- $Var(\beta_{RE})$  : Matriks varians-kovarians dari estimasi koefisien RE
- $Var(\beta_{FE})$  : Matriks varians-kovarians dari estimasi koefisien FE
- Tanda ' : menunjukkan *transpos vector* (susunan angka vektor)

- **Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui** kelayakan penggunaan model *Random Effect* lebih baik dibandingkan *Common Effect*. Pengujian melalui persamaan:

$$LM = \frac{N \cdot T}{2(T - 1)} \cdot \left( \frac{\sum_{i=1}^N (\bar{e}_i - \bar{e})^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan:

- N : Jumlah unit *cross-section* (kabupaten/kota)
- T : Jumlah observasi *time-series* (misalnya tahun)
- $\bar{e}_i$  : Rata-rata residual pada unit ke-i
- $\bar{e}$  : Rata-rata keseluruhan residual
- $\sigma^2$  : Estimasi varians residual model

Setelah memilih model yang tepat, langkah berikut adalah menguji asumsi parameter dengan *Uji Multikolinieritas* [20] untuk mengidentifikasi korelasi tinggi antara variabel independen yang dapat menyebabkan bias dalam estimasi parameter regresi.

Setelah asumsi parameter terpenuhi, tahap berikut adalah melakukan uji signifikansi parameter dengan cara uji serentak dan uji parsial. *Uji serentak (Uji-F)* untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. *Uji parsial (Uji-t)* untuk mengukur pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Hasil estimasi model memberikan pemahaman akan pengaruh variabel bebas variabel terikat, sehingga dapat membaca kesimpulan analisis regresi data panel [17].

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Uji Chow

*Uji Chow* bermaksud menentukan satu dari dua pilihan yakni model *common effect* dan *fixed effect*. Apabila tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  lebih besar dari nilai probabilitas (*Prob.*) *cross-section F* lebih kecil, maka model terpilih adalah *fixed effect model*. Dari Tabel 2 tergambar nilai probabilitas (*Prob.*) untuk *uji cross-section F* dan *chi-square* adalah 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, model *fixed effect* lebih tepat daripada *common effect*.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	213.83921	(9,85)	0.0000
Cross-section Chi-square	316.30163	9	0.0000

Sumber : Hasil Analisis, 2025

#### 3.2 Uji Hausman

Uji ini untuk mengetahui keberterimaan model *fixed effect*. Jika probabilitas (*Prob.*) *uji hausman* menghasilkan nilai lebih besar dari 0.05, maka model beralih pada *random effect model*. Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas 0.1363 lebih besar dari 0.05. Model paling tepat adalah *random effect model*.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.384305	5	0.1363

Sumber : Hasil Analisis, 2025

#### 3.3 Uji Spesifikasi Model (*Lagrange-Multiplier Test*)

Uji spesifikasi model dengan metode *Breusch-Pagan* untuk memastikan ketepatan penggunaan *random effect* daripada *common effect*. Apabila hasil uji nilai probabilitas *cross-section Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0.05, maka *random effect* adalah model yang tepat. Sebagaimana Tabel 4, *cross-section Breusch-Pagan* menunjukkan nilai probabilitas 0.0000 ( $< 0.05$ ) menguatkan keputusan penggunaan *random effect model*.

Tabel 4. Uji Langrage Multiplier

Test Hypothesis	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	262.3897 (0.0000)	0.143213 (0.7051)	262.5329 (0.0000)

Sumber : Hasil Analisis, 2025

#### 3.4 Uji Multikolinieritas

Uji ini agar mengetahui korelasi tinggi antar variabel independen. Apabila hasil uji kurang dari 0.8, maka tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 5 menunjukkan seluruh nilai korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.8, artinya tidak terjadi *multikolinieritas* pada model.

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

	<b>REFEK</b>	<b>REFIS</b>	<b>RBO</b>	<b>RBM</b>	<b>LPPD</b>
REFEK	1.000000	-0.658061	-0.103318	0.150468	-0.105333
REFIS	-0.658061	1.000000	-0.071865	0.021659	0.148048
RBO	-0.103318	-0.071865	1.000000	-0.632514	-0.034049
RBM	0.150468	0.021659	-0.632514	1.000000	-0.171848
LPPD	-0.105333	0.148048	-0.034049	-0.171848	1.000000

Sumber : Hasil Analisis, 2025

### 3.5 Uji Signifikansi Parameter (Uji-F dan Uji-t)

*Uji signifikansi parameter* untuk mengetahui gambaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas (*Prob. F-Statistic*) yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan model memiliki pengaruh kepada variabel dependen. Hasil uji pada Tabel 6 dengan nilai *Prob (F-statistic) < 0.05* mempunyai arti bahwa model memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan.

**Tabel 6. Hasil Uji-F**

<b>Statistic</b>	<b>Value</b>
Prob(F-statistic)	0.000

Sumber : Hasil Analisis, 2025

**Tabel 7. Hasil Uji-t**

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	-1.221746	0.122958	-9.936326	0.0000
REFEK	-0.010370	0.019081	-0.543485	0.5881
REFIS	-0.113509	0.096899	-1.171415	0.2444
RBO	-0.116773	0.095283	-1.225536	0.2234
RBM	0.082082	0.038458	2.134302	0.0354
LPPD	-0.532334	0.057403	-9.273639	0.0000

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan Tabel 7 variabel Rasio Belanja Modal (RBM) memiliki nilai probabilitas 0.0354, lebih kecil dari 0.05. Nilai tersebut bermakna bahwa variabel RBM mempunyai pengaruh yang signifikan untuk tingkat kemiskinan. Variabel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga berpola sama, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas sebesar 0.0000, berada jauh di bawah batas signifikansi 0.05. Berbeda dari dua variabel tersebut, hasil uji pada rasio efektivitas (REFEK) dengan nilai probabilitas sebesar 0.5881, rasio efisiensi (REFIS) mempunyai nilai probabilitas 0.2444, dan rasio belanja operasional (RBO) sebesar 0.2234, ketiganya berada di atas ambang batas signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan wilayah.

*Uji-F* menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan model memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun, berdasarkan hasil *Uji-t*, hanya variabel Rasio Belanja Modal (RBM) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, RBM memiliki dampak positif terhadap kemiskinan, sebaliknya LPPD berdampak negatif terhadap kemiskinan. Persamaan regresi yang menggambarkan hubungan tersebut adalah  $Y = -1.221 + 0.082RBM - 0.5323LPP$ .

Dengan demikian, rasio belanja modal dan skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dua faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan wilayah

lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk rasio belanja modal dengan perolehan nilai 0.082 menunjukkan bahwa apabila rasio belanja modal meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.082. Temuan yang memperkuat kondisi ini banyak terjadi pada berbagai negara. Referensi [20] menemukan bahwa belanja modal pemerintah di Nigeria tidak mengurangi kemiskinan. Aspek kebijakan fiskal tidak secara efektif mengatasi kemiskinan di Nigeria. Referensi [21] juga menunjukkan hal yang sama bahwa rasio pengeluaran modal tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Belanja modal pemerintah mengalami kegagalan dalam mengurangi kemiskinan karena berbagai faktor. Korupsi dan tata kelola yang buruk menghambat efektivitas penggunaan dana, sehingga manfaat dari belanja modal tidak menjangkau masyarakat miskin. Selain itu, pemilihan proyek yang tidak tepat dengan kebutuhan nyata masyarakat miskin. Implementasi yang kurang efektif, seperti keterlambatan proyek atau kualitas konstruksi yang rendah, juga mengurangi manfaat dari belanja modal. Proyek infrastruktur besar sering kali membutuhkan waktu lama untuk selesai, sehingga lamban dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan.

Kebijakan fiskal juga sering tidak terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya, sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan terbatas. Selain itu, distribusi pendapatan yang tidak merata memperburuk kesenjangan sosial serta ketidakstabilan ekonomi makro seperti inflasi tinggi dan ketidakpastian politik memperparah kondisi kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, maka perlu memastikan tata kelola yang baik, memilih proyek yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin, serta mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan program sosial lainnya.

Pada tataran skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan nilai  $-0,5323$  mempunyai arti, jika skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah naik sebanyak 1 (satu) satuan akan menurunkan kemiskinan sebesar  $-0,5323$ . Skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) berhubungan dengan tingkat kemiskinan karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintah daerah. LPPD mengukur berbagai aspek kinerja pemerintah, termasuk pengelolaan anggaran, pelayanan publik, dan implementasi program sosial dan ekonomi.

Pemerintah daerah dengan skor LPPD yang meningkat cenderung memiliki perbaikan dalam tata kelola yang baik, seperti perencanaan yang matang, penggunaan anggaran efektif, serta pelaksanaan program tepat sasaran. Efektivitas dalam tata kelola ini memastikan bahwa penggunaan dana dan sumber daya harus optimal untuk proyek dan program yang relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Adapun tata kelola pemerintah yang baik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdampak pada penurunan kemiskinan menguatkan hasil penelitian [22] di 32 Provinsi di Indonesia, sekaligus mengoreksi hasil penelitian [23] yang menggarisbawahi tata kelola pemerintah berposisi sebagai instrumen tidak langsung untuk menekan angka kemiskinan. Baginya penurunan tingkat kemiskinan memerlukan kebijakan bersifat langsung. Temuan tersebut berbeda dengan hasil penelitian ini bahwa kebijakan kemiskinan tanpa tata kelola yang baik tidak akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Temuan-temuan tersebut mempertimbangkan homogenitas wilayah seperti pemerataan distribusi sumber daya. Daerah dengan kekayaan sumber daya melimpah dan pendapatan tinggi, serta tata kelola

pemerintah yang baik akan lebih mampu mengatasi kemiskinan. Faktor pembeda lain adalah penyalahgunaan dana yang menyimpang dari kebutuhan masyarakat miskin. Kemudian, kualitas dan aksesibilitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang rendah. Kendala struktural dan sistemik seperti keterbatasan infrastruktur dasar dan isolasi geografis membuat program pengentasan kemiskinan sulit diimplementasikan secara efektif.

### 3.6 Tata Kelola Anggaran dan Tata Kelola Pemerintah di Nusa Tenggara Barat

Tata kelola anggaran, khususnya variabel belanja modal di Nusa Tenggara Barat tidak berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan karena beberapa alasan. Pertama, belanja modal sering kali berfokus pada proyek infrastruktur besar yang membutuhkan penyelesaian dalam waktu lama, sehingga tidak secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat miskin. Misalnya, pembangunan jalan raya atau jembatan penting dalam konteks waktu jangka panjang, tetapi berdampak dalam kurun waktu jangka pendek oleh penduduk setempat.

Selain itu, implementasi belanja modal dapat terkendala oleh korupsi, inefisiensi, atau pengelolaan proyek yang buruk. Pendanaan proyek melalui belanja modal dapat terjadi tanpa alasan kebutuhan mendesak masyarakat miskin, tetapi karena faktor politik atau ekonomi yang tidak berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Adapun pengelolaan pemerintah yang tergambarkan dari skor laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) berdampak positif pada penurunan kemiskinan karena mencakup berbagai aspek pengelolaan pemerintahan yang lebih holistik dan langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Skor LPPD yang tinggi atau mengalami peningkatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, memberikan layanan publik yang berkualitas, dan menjalankan program-program sosial dan ekonomi secara efektif, seperti penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan program bantuan sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat miskin.

Tata kelola yang baik juga memastikan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana, sehingga anggaran untuk Masyarakat lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat langsung dan signifikan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, meskipun belanja modal penting, tata kelola pemerintah yang baik memiliki dampak yang lebih langsung dan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

## 4. KESIMPULAN

Tata kelola anggaran, khususnya rasio belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan wilayah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan rasio belanja modal berakibat pada kenaikan angka kemiskinan, karena alokasi belanja kurang tepat sasaran kepada masyarakat kurang sejahtera. Sementara pada aspek tata kelola pemerintah, skor penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai korelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Peningkatan skor penyelenggaraan pemerintah menurunkan kemiskinan wilayah. Sebaliknya penurunan skor penyelenggaraan pemerintah daerah mencerminkan peningkatan kemiskinan wilayah. Berdasarkan temuan ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan perbaikan pada pengelolaan anggaran yang mengarusutamakan kebijakan anggaran *pro* masyarakat miskin. Sebab, tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintah yang baik adalah pangkal upaya

pengentasan kemiskinan wilayah. Penelitian ini menganjurkan penelitian lebih lanjut mengenai faktor sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan wilayah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat membentuk kebijakan tata kelola wilayah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, khususnya pada aspek anggaran dan pemerintahan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pimpinan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, serta pimpinan dan segenap tenaga pengajar lingkup Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University yang telah mendukung para peneliti secara materil dan moril.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Wu and F. Zhang, "Rethinking China's Urban Governance: The Role Of The State In Neighbourhoods, Cities and Regions," *Progress in Human Geography*, vol. 46, no. 3, pp. 775–797, 2022, doi: 10.1177/03091325211062171.
- [2] A. Albassam, "The Influence of Budget Transparency on Quality of Governance," *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, vol. 2015, pp. 1–9, 2015, doi: 10.4172/2332-0761.1000S1.009.
- [3] B. C. Egbide and G. Agbude, "Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse," *SSRN Electronic Journal*, 2014, doi: <https://ssrn.com/abstract=2478725>
- [4] R. Drăcea, M. Pirtea, M. Cristea, G. G. Noja, and L. Ciobanu, "Budget Transparency and Good Governance for Human Development and Citizens' Well-Being. New Empirical Evidence from the European Union," *The Engineering Economics*, vol. 35, no. 3, pp. 328–347, 2024, doi: 10.5755/j01.ee.35.3.34024.
- [5] M. Arizal, N. Fitriyani, dan B. N. Syechah, "Modeling Factors Affecting Poverty in Nusa Tenggara Using The Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) Method," *Maj. Ilm. Mat. Stat.*, vol. 24, no. 2, hlm. 161, 2024, doi: <https://doi.org/10.19184/mims.v24i2.43167>.
- [6] Sekretaris Daerah Provinsi NTB, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik*, 2018.
- [7] N. A. L. Dongi, Y. Sading, E. Jokolelono, A. H. Jaya, and F. M. Tuty, "The Role of BAPPEDA In Formulating Planning and Budgeting in Intervening in Poverty Reduction," *Golden Ratio of Data in Summary*, vol. 4, no. 1, pp. 59–67, 2024, doi: 10.52970/grdis.v4i1.509.
- [8] A. A. Wudil, N. Saad, J. Omercic, L. Zakaria, and R. Muhammad, "Government Budgets and Poverty Reduction in Developing Countries: A Systematic Review of The Role of Social Welfare Programs and The Challenges Ahead," *Economics and Finance*, vol. 11, no. 2, pp. 67–72, 2023, doi: 10.51586/2754-6209.2023.11.2.67.72.
- [9] Y. A. Gudban, C. F. Ananda, S. Susilo, and S. T. Wahyudi, "The Local Government Budget (APBD) and Its Inefficiency in the City of Malang, Indonesia," *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, vol. 22, no. 03, pp. 31–34, 2017, doi: 10.9790/0837-2203043134.
- [10] G. G. Noja, M. Cristea, E. Thalassinou, and M. Kadłubek, "Interlinkages Between Government Resources Management, Environmental Support, and Good Public Governance. Advanced Insights From The European Union," *Resources*, vol. 10, no. 5, 2021, doi: 10.3390/resources10050041.
- [11] A. W. Harahap, . M., J. Ilmiha, and S. Effendi, "Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas dan Efisiensi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan," *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, vol. 8, no. 1, pp. 39–44, 2021, doi: 10.30743/akuntansi.v8i1.4063.
- [12] A. I. Ramadhan and N. Z. Riani, "Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Negara-Negara ASEAN," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, vol. 6, no. 1, p. 41, 2024, doi: 10.24036/jkep.v6i1.15838.

- [13] A. Arewa, "Budget Trends, Poverty Reduction and COVID-19: United States of America and Nigeria as Case Studies," pp. 501–536, 2023, doi: 10.4236/jss.2023.115031.
- [14] M. Zuhri, A. Jamal, and P. B. Syathi, "Analysis of Short and Long Term Effect on Government Expenditure Realization and Income Disparity Toward Poverty in Aceh Province, Indonesia," *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, vol. 3, no. 2, pp. 88–92, 2022, doi: 10.46336/ijbesd.v3i2.278.
- [15] M. Ronaghi and E. Scorsone, "The Impact of Governance on Poverty and Unemployment Control Before and After the 2020 Covid Outbreak in the United States," *Regional and Sectoral Economic Studies*, vol. 23, no. 2, pp. 35–56, 2023.
- [16] H. J. Kwon and E. Kim, "Poverty Reduction and Good Governance: Examining the Rationale of The Millennium Development Goals," *Development and Change*, vol. 45, no. 2, pp. 353–375, 2014, doi: 10.1111/dech.12084.
- [17] W. H. Greene, *Econometric Analysis*, 8th ed. Pearson, 2018.
- [18] T. A. Prasanti, T. Wuryandari, and A. Rusgiyono, "Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Gaussian*, vol. 4, no. 3, pp. 687–696, 2015.
- [19] M. Irwansyah, R. Ruliana, and M. K. Aidid, "Analisis Regresi Balanced Panel Dengan Komponen Galat Dua Arah pada Kasus Melek Huruf Masyarakat di Provinsi NTB," *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, vol. 3, no. 1, p. 10, 2021, doi: 10.35580/variensiunm14644.
- [20] R. Andhykha, H. R. Handayani, and N. Woyanti, "Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah," *Media Ekonomi Dan Manajemen*, vol. 33, no. 2, pp. 113–123, 2018, doi: 10.24856/mem.v33i2.671.
- [21] J. Owuru and A. Farayibi, "Examining The Fiscal Policy-Poverty Reduction Nexus in Nigeria," *SSRN Electronic Journal*, 2016. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2846065>
- [22] R. B. Adha, "Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)," 2016. [Online]. Available: <http://digilib.unila.ac.id/24501/>
- [23] I. Rizqi and A. K. Galuh, "Analisis Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan," *Journal Of Development Economic And Social Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 263-272, 2022, doi: 10.21776/jdess.2022.01.2.09.